

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
Alamat : Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Bupati Kampar Telp. 0762-7320068  
**BANGKINANG**

**LAPORAN KINERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**BANGKINANG, JANUARI 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2023 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di dalam RENSTRA. LKjIP ini menjelaskan beberapa aspek informasi yang terkait langsung dengan keadaan kinerja OPD secara umum. Aspek yang dijelaskan meliputi : keadaan umum (hingga tahun 2023), Tugas Pokok dan fungsi, Rencana Strategis dan Rencana Kinerja beserta target dan capaiannya. Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pembangunan dijelaskan di dalam akuntabilitas kinerja yang memuat seberapa jauh pencapaian terhadap indikator-indikator kinerja kegiatan. Sedangkan akuntabilitas keuangan memuat penjelasan mengenai seberapa jauh realisasi penggunaan anggaran seluruh kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa LKjIP Tahun 2023 yang disusun masih jauh dari kesempurnaan, kami berharap LKjIP Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.

Bangkinang, Januari 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN KAMPAR

**MARAHALIM, S.Pt**

NIP. 19761013 200501 1 007

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
A. Keadaan Umum.....	6
1. Kepegawaian.....	6
2. Unsur Sarana dan Prasarana Penunjang.....	6
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Stratejik.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).....	27
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	32
B. Evaluasi Kinerja.....	38
1. Akuntabilitas Kinerja.....	38
2. Akuntabilitas Keuangan.....	42
3. Pendapatan Asli Daerah.....	45
BAB IV. PENUTUP.....	46
LAMPIRAN :	
1. Struktur Organisasi	
2. Laporan Realisasi Fisik Keuangan	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan Pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang menggambarkan arah strategis terhadap peluang-peluang yang ingin diciptakan meliputi ; (1) Membentuk aparatur professional dan inovatif, (2) Mewujudkan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan dan peternakan, (3) Promosi atas hasil produksi perkebunan dan peternakan unggulan daerah, (4) Memperkuat aspek permodalan usaha tani, (5) Tersedia akses jalan produksi di kawasan perkebunan dan sarana lainnya, (6) Pengembangan komoditas peternakan berdasarkan pengembangan kawasan produksi melalui introduksi teknologi yang disesuaikan potensi wilayah dan sistem manajemen yang efisien dalam upaya pemanfaatan sumber-sumber daya lokal, (7) Peningkatan potensi sumberdaya manusia sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam hal produksi, pemasaran, peningkatan nilai tambah dan menjaga keberlangsungan usaha, (8) Peningkatan penyediaan fasilitas layanan baik kuantitatif maupun kualitatif secara lebih merata untuk melayani aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi hasil peternakan, (9) Peningkatan aktivitas penelitian sehingga dihasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang lebih efisien.

Sasaran Pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan difokuskan pada ; (1) Peningkatan Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (2) Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (3) Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (4) Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (5) Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, (6) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian, (7) Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar terdiri atas Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja. Dari sisi Akuntabilitas Keuangan pada tahun 2023 seluruh program dan kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mampu menyerap anggaran sebesar 86,73 %. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja pada pencapaian sasaran kegiatan untuk realisasi fisik adalah sebesar 90,69 %.

Dalam rangka mempertahankan kinerja di masa yang akan datang, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar akan menerapkan berbagai strategi yang meliputi : peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan akurasi data, penjadwalan SDM pada kegiatan yang optimal, peningkatan respon oleh para PPTK/pengambil kebijakan khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

BAB	PENDAHULUAN
I	

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu perwujudan penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Wujud nyata layanan publik adalah berupa implementasi program dan kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 yang bersumber pada Rencana Kerja 2023. Faktor pendukung bagi kelancaran pelaksanaan aktivitas birokrasi erat kaitannya dengan unsur yang dimiliki oleh OPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan itu sendiri.

Unsur penunjang dapat ditinjau dari keadaan umum Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi unsur perangkat personal (*humanware*) dan perangkat keras (*hardware*). Sedangkan tinjauan dari unsur perangkat lunak (*software*) yaitu berupa tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang tercantum dalam Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## A. Keadaan Umum

### 1. Kepegawaian

Secara umum unsur kepegawaian di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar belum cukup memadai dari segi jumlah dan kebutuhan. Jumlah PNS di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar pada Tahun 2023 adalah 64 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur dapat dilihat dalam Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Komposisi Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	Sarmud	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	<b>1</b>
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	<b>1</b>
3.	Kepala Bidang	1	2	-	-	-	-	<b>3</b>
4.	Ka subbag	-	-	-	1	-	-	<b>1</b>
5.	Fungsional		11					<b>11</b>
6.	Pelaksana Dinas Kab	-	11	2	7	-	-	<b>20</b>
7.	Kepala UPT	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kasubbag TU UPT Dinas	-	-	-	-	-	-	-
9.	Petugas Lapangan/Staf UPT Dinas	-	14	-	12	1	-	<b>27</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	-	<b>64</b>

### 2. Unsur Sarana dan Prasarana Penunjang

Unsur sarana/prasarana penunjang pekerjaan kantor dapat di bagi ke dalam dua kategori :

#### 1. Sarana Fisik Peralatan Kantor

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan fungsi dan jabatannya maka di Tahun 2023 ini Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan penambahan sarana fisik peralatan kebersihan kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada.

## 2. Sarana Fisik Bangunan

Pada tahun 2023 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pekerjaan sarana fisik bangunan berupa Rehabilitasi Puskesmas, Rehabilitasi Rumah Potong Hewan dan Rehabilitasi Kantor.

Tabel 2. Sumber Daya Asset yang dimiliki Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	kuantitas	kondisi	Ket
I	Gedung Kantor:				
1.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>		Baik	UPTD Wil II Tapung
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
2.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>		Baik	UPT Pembibitan
	- Bangunan	Unit	4	Baik	
3.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	1,150,05	Baik	Puskesmas Tambang
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
4.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	713,5	Baik	Puskesmas Siak Hulu
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
5.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	600	Baik	Puskesmas Kampar
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
6.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	875	Baik	Puskesmas P.Raja
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
7.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	750	Baik	Puskesmas Suka Mulya
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
8.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	625	Baik	Puskesmas Tapung
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
9.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	494	Baik	Puskesmas Kpr Kiri Hulu
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
10.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	750	Baik	Puskesmas Tapung Hulu
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
11.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	1,250	Baik	Puskesmas Tapung Hilir
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
12.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	700	Baik	Puskesmas Kpr Kiri
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
13.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	600	Baik	Puskesmas Kpr Kiri Tng
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
14.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>		Baik	Puskesmas Rumbio Jaya
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
15.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>		Baik	Puskesmas Salo
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
16.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>		Baik	Puskesmas XIII Koto Kpr
	- Bangunan	Unit	1	Baik	
17.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	85,000	Baik	UPT Ternak Unggas
	- Bangunan	Unit	17	Baik	
	- Bangunan	Unit	8	K.Baik	
18.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	1,000	Baik	UPT RPH
	- Bangunan	Unit	11	Baik	
19.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	1,000	Baik	UPT RPU
	- Bangunan	Unit	3	Baik	
20.	- Luas Tanah	M <sup>2</sup>	85,000	Baik	UPT Pembibitan
	- Bangunan	Unit	17	Baik	



	- Bangunan	Unit	8	K.Baik	
II	Kendaraan Dinas				
1.	Roda Enam	Unit	1	Baik	UPT Pembibitan
2.	Roda Empat	Unit	5	Baik	
3.	Roda Tiga	Unit	2	Baik	
4.	Roda Dua	Unit	74	Baik	
5.	Roda Dua	Unit	8	K.Baik	
6.	Roda Dua	Unit	1	Rsk Brt	
III	Meja				
1.	Meja Eselon II	Set	1	Baik	
2.	Meja Rapat	Set	3	Baik	
3.	Meja Tulis	Buah	39	Baik	
4.	Meja Pertemuan	Buah	91	Baik	
5.	Meja Kerja	Buah	6	Baik	
6.	Meja Kerja UPT	Buah	5	Baik	
7.	Meja Biro UPT	Buah	9	Baik	
8.	Meja ½ Biro UPT	Buah	12	Baik	
IV	Kursi				
1.	Kursi Eselon II	Buah	2	Baik	
2.	Kursi Hadap	Buah	7	Baik	
3.	Kursi Rapat Ess II	Buah	7	Baik	
4.	Kursi Tamu	Set	7	Baik	
5.	Kursi Tunggu	Set	2	Baik	
6.	Kursi Direktur	Buah	60	Baik	
7.	Kursi Staf	Buah	9	Baik	
8.	Kursi Rapat Biasa	Buah	50	Baik	
9.	Kursi Putar	Buah	14	Baik	
10.	Kursi Pertemuan	Buah	73	Baik	
11.	Kursi Lipat Pertemuan	Buah	71	Baik	
12.	Kursi Putar	Buah	2	Baik	
13.	Kursi Putar Puskesmas	Buah	5	Baik	
14.	Kursi Kerja Staf Puskesmas	Buah	22	Baik	
V	Sopa Tamu Eselon II	Set	1	Baik	
VI	Lemari/Bofet	Buah	10	Baik	
1.	Lemari cabinet eselon II	Buah	1	Baik	
2.	Lemari Buku Eselon II	Buah	1	Baik	
3.	Lemari Kaca	Unit	10	Baik	
4.	Lemari Arsip	Buah	13	Baik	
5.	Lemari Kaca Satu Pintu	Unit	2	Baik	
6.	Lemari Arsip dan Obat Puskesmas	Unit	5	Baik	
7.	Tempat tidur	Buah	1	Baik	
8.	AC	Unit	20	Baik	
9.	Rak TV	Buah	1	K. Baik	
10.	Komputer	Unit	23	Baik	
11.	Printer brother	Unit	1	Baik	
	Printer canon	Unit	1	Baik	
	Printer canon	Unit	1	K.Baik	
	Printer Epson	Unit	1	Baik	
	Printer	Unit	11	Baik	
12.	Proyektor/infokus	Unit	2	Baik	
13.	Televisi	Buah	4	Baik	
14.	Gambar presiden/wapres	Buah	4	Baik	
15.	Gambar garuda	Buah	1	Rsk Brt	

16.	Filling cabinet	Unit	20	Baik	
17.	Mesin tik manual	Unit	3	Baik	
	Mesin rumput	Unit	2	Baik	
	Mesin pompa air dan tengki air	Unit	1	Baik	
	Mesin pompa air	Unit	2	Baik	
	Mesin fogging	Unit	1	Baik	
18.	Laptop	Unit	7	Baik	
19.	White board	Buah	2	Baik	
20.	LCD Monitor	Buah	1	Baik	
21.	CPU	Buah	1	Baik	
22.	Wireles	Buah	8	Baik	
23.	Laptop	Unit	12	Baik	
24.	Tablet	Unit	1	Baik	
25.	Plotter (mesincetak peta)	Unit	1	Baik	
26.	Kamera	Buah	6	Baik	
27.	Computer notebook	Unit	7	Baik	
28.	Tangga lipat	Buah	1	Baik	
29.	GPS	Unit	8	Baik	
30.	Pisau Okulasi	Buah	12	Baik	
31.	Hand counter	Buah	31	Baik	
32.	PH Meter	Buah	8	Baik	
33.	Tempat pemasangan baliho	Unit	1	Baik	
34.	Kipas angin	Unit	7	Baik	
35.	Infocus+layar	Unit	5	Baik	
36.	Suger set minor	Buah	3	Baik	
37.	Kulkas	Buah	4	Baik	
38.	Ups/stabilizer	Buah	2	Baik	
39.	Pisau potong daging	Buah	1	Baik	
40.	Alat pemeriksaan specimen rabies	Unit	2	Baik	
41.	Container IB	Unit	8	Baik	
42.	Inkubator	Unit	1	Baik	
43.	Alat ukur ternak	Unit	1	Baik	
44.	Drone	Unit	1	Baik	
45.	Alat kedokteran hewan	Kontainer	4	Baik	
46.	Kontruksi jaringan air bersih	Unit	1	Baik	
47.	Kontruksi jaringan air bersih	Unit	1	Baik	
48.	Instalasi listrik	Unit	1	Baik	

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

- **Tugas Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, maka Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- **Fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut tersebut Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas dijabarkan lagi kepada tugas pokok dan fungsi masing masing eselon yang meliputi :

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang usaha Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
6. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD)

## 2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan aset, program dan perencanaan, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Melakukan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
4. Melakukan pengendalian penertiban surat perintah tugas bagi pegawai;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

- sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**a. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian dan pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan :

1. Pelaksanaan administrasi surat meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
4. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
5. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
6. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
7. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
8. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai,

- hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
9. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
  10. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Usaha Perkebunan**

Bidang Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, peredaran hasil perkebunan dan konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perkebunan;
2. Memfasilitasi penyelesaian konflik usaha perkebunan;
3. Pengawasan gangguan usaha perkebunan;
4. Memberikan pertimbangan teknis perkebunan;
5. Menyusun rencana Penilaian Usaha Perkebunan (PUP);
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan perkebunan;
7. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luasan areal;
8. Penanganan konservasi lahan perkebunan;
9. Penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;

10. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Usaha Tani**

Bidang Usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Budidaya Tanaman Perkebunan, Sarana, Prasarana dan Pemasaran, Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman :

1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman perkebunan;
2. Pembinaan dan pengawasan produsen benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih dan atau bibit perkebunan;
3. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap budidaya tanaman perkebunan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran, penyaluran dan penggunaan pupuk pestisida;
5. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pembangunan, rehabilitasi jalan produksi perkebunan;
6. Pemanfaatan, perawatan serta penggunaan alat dan mesinpertanian/perkebunan;
7. Melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemanfaatan sumberdaya dan teknologi perkebunan;
8. Melakukan inventarisasi perkembangan usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
9. Melaksanakan pembinaan penanganan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
10. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan;
11. Menyelenggarakan dan fasilitasi yang berkaitan dengan sumber daya perkebunan, yang meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan;

12. Menyelenggaraan pengoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) budidaya tanaman perkebunan;
13. Memeriksa dan menilai hasil kerja dan atau kinerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
14. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Dinas;
15. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **5. Bidang Peternakan**

Bidang Peternakan dikepalai oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang budidaya dan pengembangan ternak, perbibitan dan produksi ternak, serta pengawasan mutu dan pakan ternak. yang meliputi :

1. Menyusun program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
2. Melaksanakan pengendalian program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
3. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
4. Membuat pelaporan pelaksanaan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



## 6. Bidang Kesehatan Hewan

Bidang kesehatan hewan dikepalai oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan serta peningkatan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan dan Perlindungan Penyakit Hewan (P4H), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan pelayanan kesehatan hewan, Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan serta Pengawasan Obat Hewan (POH) yang meliputi :

1. Menyiapkan kebijakan dalam rangka pengembangan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan dan sarana prasarana kesehatan hewan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
3. Melaksanakan pembinaan dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan hewan;
4. Melakukan pembinaan terhadap Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;
5. Memimpin penyelenggaraan tugas/pekerjaan dilingkungan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Struktur organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Usaha Perkebunan
4. Bidang Usaha Tani
5. Bidang Peternakan
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dibantu oleh 7 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :

1. UPT Pembibitan Perkebunan
2. UPT Pembibitan Peternakan
3. UPT Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas
4. UPT Laboratorium Veteriner Klinik Hewan
5. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah I
  - a) Kecamatan Koto Kampar Hulu
  - b) Kecamatan XIII Koto Kampar
  - c) Kecamatan Kuok
  - d) Kecamatan Salo
  - e) Kecamatan Bangkinang Kota
  - f) Kecamatan Bangkinang
  - g) Kecamatan Kampar
  - h) Kecamatan Rumbio Jaya

- i) Kecamatan Kampar Utara
  - j) Kecamatan Kampa
  - k) Kecamatan Tambang
6. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah II
- a) Kecamatan Tapung
  - b) Kecamatan Tapung Hulu
  - c) Kecamatan Tapung Hilir
7. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah III
- a) Kecamatan Siak Hulu
  - b) Kecamatan Perhentian Raja
  - c) Kecamatan Gunung Sahilan
  - d) Kecamatan Kampar Kiri
  - e) Kecamatan Kampar Kiri Hilir
  - f) Kecamatan Kampar Kiri Hulu
  - g) Kecamatan Kampar Kiri Tengah

BAB	PERENCANAAN KINERJA
II	

### A. Perencanaan Stratejik

Penyusunan perencanaan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama satu tahun, sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah menuju tercapainya integritas, sinkronisasi, efisiensi yang bersinergi dengan Renstra Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun dengan rencana strategis lintas OPD yang terkait di daerah dan tingkat Provinsi serta di tingkat Pemerintah Pusat.

Perencanaan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Anggaran memuat informasi tentang kinerja yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan antara lain program kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, tolak ukur kinerja, dan target kinerja, hal ini merupakan satu kesatuan sasaran yang ingin dicapai dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

Perencanaan mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai yang berfokus pada tindakan dalam pelaksanaan aktivitas instansi/satuan kerja sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah

2. Sasaran

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan.

Rencana program untuk lima tahun kedepan penyusunan program pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar akan selalu berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar serta mengacu pada Program Pembangunan Pertanian Nasional dan program Pemerintah Kabupaten Kampar, Program Pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar terdiri dari:

**(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **(2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
  - Pemanfaatan SDG hewan/tanaman
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak
3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
  - Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah
  - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

## **(3) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani

**(4) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
  - Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
  - Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan

**(5) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
  - Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

**(6) PROGRAM PENGIZINAN USAHA PERTANIAN**

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

**(7) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

## 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

**B. Perjanjian Kinerja**

Pernyataan penetapan kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dengan Kepala Daerah Kabupaten Kampar, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dimana Kepala Daerah berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kepala OPD.

Perjanjian kinerja dimaksud telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja, target, program utama dan anggaran.

Adapun formulir penetapan kinerja tahun 2023 diperlihatkan sebagaimana di bawah ini :







<b>BAB</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
<b>III</b>	

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)**

Pengukuran Kinerja Kegiatan digunakan untuk :

- (1). Mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, benefit dan impact;
- (2). Menentukan satuan setiap kelompok indikator;
- (3). Menetapkan rencana tingkat capaian (target);
- (4). Mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;
- (5). Menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada tahun 2023 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 7 (tujuh) Program dengan 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang semuanya telah direalisasikan dengan berbagai tingkatan capaian.

Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3. berikut :

Tabel 3. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporang Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	100,00	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	

1	2	3	4	5	6
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	7 Unit	100,00	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	30 Unit	100,00	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Petani yang Memanfaatkan Sumber Daya Genetik (SDG)</b>				
Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan</b>				
Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	<b>Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>				

1	2	3	4	5	6
Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah pengawasan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit/Benih Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak</b>				
Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	8000 Ekor	8000 Ekor	100,00	
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah</b>				
Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8500 Ekor	8500 Ekor	100,00	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				
<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				
Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana produksi perkebunan	20 Unit	20 Unit	100,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Ternak Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</b>				

1	2	3	4	5	6
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 laporan	5 Laporan	100,00	
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masy. Veteriner</b>				
Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>				
Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	125 Ha	125 Ha	100,00	

1	2	3	4	5	6
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	375 Ha	375 Ha	100,00	
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				
<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Perkebunan</b>				
Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	23,67	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN</b>				
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>				
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	48 Orang	48 Orang	100,00	
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	4 Unit	4 Unit	16,93	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	100,00	

## 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator sasaran, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pada tahun 2023 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan sasaran. Sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian target sebagaimana terinci dalam Tabel 4. berikut :



Tabel 4. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	100,00	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	7 Unit	100,00	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	30 Unit	100,00	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Petani yang Memanfaatkan Sumber Daya Genetik (SDG)</b>				
Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	

Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan</b>				
Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	<b>Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>				
Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah pengawasan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit/Benih Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak</b>				
Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	8000 Ekor	8000 Ekor	100,00	
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah</b>				
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8500 Ekor	8500 Ekor	100,00	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				
<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				
Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	

<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana produksi perkebunan	20 Unit	20 Unit	100,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Ternak Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</b>				
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	100,00	
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masy. Veteriner</b>				
Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>				

Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	125 Ha	125 Ha	100,00	
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	375 Ha	375 Ha	100,00	
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				
<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Perkebunan</b>				
Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	23,67	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN</b>				
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>				
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	48 Orang	48 Orang	100,00	
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	4 Unit	4 Unit	16,93	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	100,00	

## B. EVALUASI KINERJA

Pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2023 dapat ditinjau pada dua aspek akuntabilitas yaitu *Akuntabilitas Kinerja* dan *Akuntabilitas Keuangan*. Akuntabilitas Kinerja berkaitan dengan seberapa jauh Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dicapai. Indikator yang bersifat terukur dihitung dalam satuan persentase, atau nilai perbandingan antara target yang telah dicapai terhadap target indikator yang ditetapkan, sedangkan Akuntabilitas Keuangan merupakan hasil pengukuran terhadap seberapa jauh penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinyatakan dalam persentase.

### 1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kampar. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa input, output dan outcome. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja internal Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Indikator yang ditetapkan untuk indikator input adalah dana yg digunakan, sedangkan indikator output yang ditetapkan masih menggunakan indikator yang bersifat umum.

Selanjutnya Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar menetapkan indikator-indikator kinerja dengan pendekatan sebagai berikut :

- Indikator Input : Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan untuk menghasilkan keluaran antara lain, dana, SDM, waktu dan peraturan.
- Indikator Output : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan misalnya bertambahnya SDM yang berkualitas auditor trampil, pengawasan di lapangan yang berbobot atau berkualitas.
- Indikator Benefit : Manfaat dari keluaran output antara lain difungsikan SDM yang berkualitas auditor trampil dalam pengawasan pekerjaan sebagai bahan penimbun ditindaklanjuti hasil pelaksanaan.
- Indikator Impact : Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan misalnya kinerja satuan kerja lebih.

Pengukuran kinerja untuk sasaran pengembangan dan pemanfaatan sistem koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, diperoleh dengan membandingkan realisasi kinerja yang dinamis dan responsif. Untuk terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan sistem koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang dinamis dan responsif dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan.

Dari beberapa indikator kinerja seperti tersebut di atas, seluruh kegiatan tercapai sasarnya. Pencapaian sasaran kegiatan untuk realisasi fisik Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar adalah 90,69 %.

Berikut adalah capaian kegiatan fisik :

Tabel 5. Akuntabilitas Kinerja

No	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	271.617.720	100 %	
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	41.918.095	100 %	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.765.393.560	100 %	
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.034.740	100 %	
3.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.016.970	100 %	
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350.584.176	100 %	
	3. Penyediaan bahan logistik kantor	108.979.800	100 %	
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84.710.320	100 %	
	5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	155.268.000	100 %	
	6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	476.598.000	100 %	
4.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	189.339.600	100 %	
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	983.731.804	100 %	
5.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	164.346.400	100 %	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.772.400	100 %	
	3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	192.000.000	100 %	
II	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
	1. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	476.987.000	100 %	
	2. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1.315.283.035	100 %	



2.	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1. Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	120.990.000	100 %	
3.	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Penceger</b>			
	1. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	23.066.490	100 %	
4.	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	865.397.400	100 %	
5.	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah</b>			
	1. Pengadaan Benih/bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	745.729.000	100 %	
III	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			
1	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			
	1. Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan	298.430.790	100 %	
2	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>			
	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	4.025.386.925	100 %	
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			
1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	17.865.420	100 %	
	2. Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	839.797.270	100 %	
2	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752.875.000	100%	
3	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			
	1. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	92.151.840	100 %	
4	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>			
	1. Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	421.746.440	100 %	
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			
	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	331.056.875	100 %	
	2. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	66.389.100	100 %	
VI	<b>PROGRAM PENGIZINAN USAHA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	1.256.907.407	23,67 %	
VII	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			
1.	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			
	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	613.253.650	100 %	

	2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	1.537.886.073	16,93 %	
	3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	401.434.905	100%	
	<b>Total</b>	<b>24.055.946.205,-</b>	<b>90,69 %</b>	

## 2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan ukuran seberapa jauh/besar penyerapan anggaran yang digunakan untuk implementasi program dan kegiatan tahun 2023. Nilai rasio antara besarnya anggaran yang digunakan terhadap pagu anggaran merupakan satu-satunya ukuran akuntabilitas keuangan yang belum menggambarkan tingkat keberhasilan program dan kegiatan, ukuran tingkat keberhasilan dinilai dari akuntabilitas kinerja seperti yang telah dijelaskan pada poin A di atas.

Adapun Akuntabilitas Keuangan program dan kegiatan tahun 2023 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 6. Akuntabilitas Keuangan

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Nilai Kegiatan (RP)	REALISASI KEUANGAN		Ket
			(Rp)	( % )	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	271,617,720.00	240,496,496.00	88.54	
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	41,918,095.00	39,531,500.00	94.31	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6,765,393,560.00	6,684,566,380.00	98.81	
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3,034,740.00	3,001,440.00	98.90	
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,016,970.00	13,016,970.00	100.00	
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350,584,176.00	332,875,472.00	94.95	
	3. Penyediaan bahan logistik kantor	108,979,800.00	99,698,800.00	91.48	
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84,710,320.00	79,458,040.00	93.80	

	5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	155,268,000.00	153,588,000.00	98.92	
	6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	476,598,000.00	372,261,397.00	78.11	
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	189,339,600.00	109,279,628.00	57.72	
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	983,731,804.00	937,364,394.00	95.29	
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	164,346,400.00	153,464,000.00	93.38	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,772,400.00	49,772,400.00	100.00	
	3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	192,000,000.00	190,121,466.13	99.02	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	1. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	476,987,000.00	464,724,020.00	97.43	
	2. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1,315,283,035.00	1,295,362,700.00	98.49	
<b>2</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	1. Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	120,990,000.00	99,035,000.00	81.85	
<b>3</b>	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>				
	1. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	23,066,490.00	22,293,000.00	96.65	
<b>4</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	1. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	865,397,400.00	856,977,728.82	99.03	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>				
	1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	745,729,000.00	735,604,000.00	98.64	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				
	1. Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan	298,430,790.00	283,077,700.00	94.86	
<b>2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				

	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	4,025,386,925.00	4,007,690,453.05	99.56	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				
<b>1</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	17,865,420.00	17,306,000.00	96.87	
	2. Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	839,797,270.00	821,295,649.07	97.80	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752,875,000.00	742,580,000.00	98.63	
<b>3</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				
	1. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	92,151,840.00	90,550,400.00	98.26	
<b>4</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>				
	1. Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	421,746,440.00	384,580,026.17	91.19	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				
	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	331,056,875.00	325,329,500.00	98.27	
	2. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	66,389,100.00	63,601,000.00	95.80	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGIZINAN USAHA PERTANIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	1,259,907,407.00	160,322,250.00	12.72	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>				
	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	613,253,650.00	606,060,750.00	98.83	
	2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	1,537,886,073.00	35,883,400.00	2.33	
	3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	401,434,905.00	392,389,400.00	97.75	
<b>JUMLAH</b>		<b>24,055,946,205.00</b>	<b>20,863,159,360.24</b>	<b>86.73</b>	

Alokasi Anggaran Tahun 2023 untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar pada anggaran murni APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp. 24.055.946.205,- untuk 34 sub kegiatan.

Selama dalam pelaksanaannya, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 20.863.159.360,24 atau 86,73 % dari total anggaran.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), diperoleh nilai akhir evaluasi kinerja atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2023 yaitu **sangat berhasil/efektif**, dengan skala ordinal terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Skala Pengukuran Ordinal untuk Evaluasi Kinerja

<b>Interval</b>	<b>Kategori</b>
85-100	Sangat Berhasil/Efektif
70-84,9	Berhasil/Efektif
55-69,9	Cukup Berhasil/Efektif
< 55	Tidak Berhasil/Tidak Efektif

Dari hasil evaluasi, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar dalam pencapaian yang optimal.

### 3. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi PAD

No	Kegiatan	Dalam DPPA	Realisasi	%
	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>331.000.000</b>	<b>295.252.500</b>	<b>89.20%</b>
1	Retribusi Rumah Potong Hewan	66.000.000	42.850.000	64.92%
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
	• Retribusi pembibitan ternak unggas	65.000.000	52.402.500	80.62%
	• Retribusi Penjualan Bibit Kelapa Sawit	200.000.000	200.000.000	100%

BAB	PENUTUP
IV	

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran akhir tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran kinerja organisasi OPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah sangat berhasil/efektif dengan akuntabilitas kinerja sebesar 90,69 % dan akuntabilitas keuangan sebesar 86,73 %.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menerapkan berbagai strategi yang meliputi : peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan akurasi data, penjadwalan SDM pada kegiatan yang optimal, peningkatan respon oleh para PPTK/PPK/pengambil kebijakan khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.